

IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT. TELKOM INDONESIA, TBK DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR KANTOR DAERAH TELEKOMUNIKASI SURABAYA BARAT PADA INDUSTRI TENUN SARUNG DI DESA WEDANI, KECAMATAN CERME – KABUPATEN GRESIK JAWA TIMUR

Oleh: Kristyan Dwijosusilo, M.KP , Risha Masruroh

Abstract

Dwijokosusilo; Masruroh, 2019. “Implementation Of Partnership And Community Development Program Pt. Telkom Indonesia, Tbk Regional Division V East Java Telecommunication Regional Office In West Surabaya In Weaving Industry In The Village Of Wedani, Cerme Subdistrict – Gresik Regency East Java”. Public Administration, Dr. Soetomo University Surabaya.

The Partnership and Community Development Program (PKBL) is a program to improve the ability of small businesses to become resilient and independent through the use of funds from the profits of state-owned enterprises (BUMN). The obligation for BUMN is stated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number 05 / MBU / 2007 where BUMN are required to set aside 2% of their net profit for PKBL. This study wants to describe how the implementation of PKBL PT. Telkom Indonesia, Tbk Regional Division V East Java Regional Office of Telecommunications (Kandatel) West Surabaya in Weaving Glove Industry in Wedani Village, Cerme District, Gresik Regency, East Java.

The methodology of this research is qualitative descriptive. The analysis of this study using the Merille S. Grindle policy implementation model includes process factors, achievement of policy objectives, public support, resources, communication, implementer programs and compliance-responsibility. The loan process runs smoothly because the fostered partners can fulfill the specified requirements but in the process of repayment the installments are not running smoothly. PKBL has succeeded in achieving its stated goals despite its success varies among the fostered partners. Public support is shown by the number of fostered partners applying for capital loans with consideration of low interest, flexible requirements and there are various programs to help them succeed in achieving their business goals. Resources from PT. Telkom has worked optimally because it has carried out socialization, assistance, monitoring and guidance so that a maximum of 100 million loans are sufficiently absorbed by the trained partners with a variety of loans. Communication has been carried out continuously to obtain measures of achievement of results and levels of satisfaction. The implementation

program continues to be carried out quite a lot, not only soft loan assistance, but also followed by online marketing techniques, training on website marketing for woven sarong products, and facilitating participation in home industry product craft exhibitions, management of woven glove cooperatives in Wedani village, and internet network installation. . For compliance and response factors, the assisted partners in general have carried out all obligations even though they cannot be maximized and still need to be improved in the future.

Keywords : Implementation, Partnership & Community Development Program, Weaving Gloves, PT. Telkom

1. Pendahuluan

Salah satu isu penting yang masih terus menjadi perhatian dalam dunia usaha hingga saat ini yaitu terkait tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau biasa disingkat dengan CSR. Wujud tanggung jawab sosial perusahaan ini dilakukan demi tercapainya sebuah keseimbangan dalam dunia usaha yaitu antara pelaku bisnis / usaha (perusahaan) dengan masyarakat (*stakeholders*). Dalam lingkup internal perusahaan, implementasi CSR merupakan keputusan strategis perusahaan yang secara sadar didesain sejak awal untuk menerapkan lingkungan kerja yang sehat, kesejahteraan pegawai terjamin, aspek bahan baku dan limbah yang ramah lingkungan, serta semua aspek yang berkaitan dalam menjalankan usaha dijamin tidak menerapkan praktek-praktek yang membahayakan atau merugikan pihak lain.

Sedangkan dalam lingkup eksternal perusahaan, implementasi CSR juga harus dapat memperbaiki aspek sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar perusahaan pada khususnya serta lingkungan masyarakat pada umumnya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan secara berkelanjutan.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini karena hanya bersifat kesukarelaan, maka banyak perusahaan yang menghiraukannya. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga pada akhirnya implementasinya bukan lagi sebuah kesukarelaan melainkan berubah menjadi suatu kewajiban. Kewajiban bagi perusahaan tersebut tertuang dalam peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang ditujukan bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang wajib untuk menyisihkan 2% dari laba bersihnya setelah dikurangi pajak sebagai dana

operasional pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Pembina seluruh BUMN merespon adanya peningkatan partisipasi BUMN terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan kondisi sosial masyarakat, serta lingkungan di sekitar wilayah usaha BUMN dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 pada tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL adalah istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tersebut selanjutnya dikelola oleh suatu unit yang disebut dengan *Community Development Center* (CDC).

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Kemitraan merupakan jalinan kerja sama usaha yang menjadi strategi bisnis antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan adanya prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan yang dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah, dimana dalam kerja sama tersebut ada suatu pembinaan dan pengembangan karena pada dasarnya masing-masing pihak tentunya memiliki suatu kelemahan dan kelebihan yang dapat saling melengkapi. Hanya dengan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, maka dunia usaha yang berskala kecil maupun menengah akan mampu untuk bersaing.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

PT. Telkom Indonesia, Tbk merupakan salah satu BUMN yang berkomitmen untuk senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan wilayah usahanya melalui kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud tanggung jawab sosial

perusahaan (*Good Corporate Citizenship*) dengan mengimplementasikannya ke dalam PKBL sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 5 Tahun 2007.

Untuk lebih spesifiknya, peneliti tertarik melakukan penelitian pada industri tenun sarung di desa Wedani, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebagai wujud dari terimplementasikannya CSR dalam bentuk Program Kemitraan oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk karena desa Wedani adalah desa yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian *home industry* sarung tenun, tak kurang dari 25 unit usaha keluarga (*home industry*) sarung tenun tradisional, baik yang berskala kecil (± 10 orang tenaga kerja) sampai dengan skala yang agak besar (± 100 orang tenaga kerja). Dengan mempertahankan proses penenunan yang masih tradisional, sarung tenun tradisional khas Gresik Jawa Timur ini dikenal akan kaya motif dan corak. Untuk itu, perlu adanya sinergi melalui program kemitraan dalam *home industry* sarung tenun tersebut agar ciri khas tradisional dari Gresik Jawa Timur ini dapat terus dilestarikan dan diharapkan dapat lebih berkembang lagi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka permasalahan penelitian ini adalah “ Bagaimana Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pada Perseroan Terbatas Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom Indonesia, Tbk) Divisi Regional V Jawa Timur – Kantor Daerah Telekomunikasi (Kandatel) Surabaya Barat Pada Industri Tenun Sarung di Desa Wedani, Kecamatan Cerme – Kabupaten Gresik Jawa Timur”.

2. Kerangka Teori

2.1. Definisi Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik banyak dikemukakan oleh para ahli, antara lain yaitu dikemukakan oleh Friedrick (dalam Albab, 2007:14) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Laswell dan Kaplan (dalam Albab, 2007:15) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sejalan dengan Laswell dan Kaplan, Edwards dan Sharkansky (dalam Albab, 2007:15) juga mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan

dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik tersebut berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Selanjutnya dalam pandangan Eulau dan Prewitt (dalam Albab, 2007:18), kebijakan publik di dalamnya memuat beberapa istilah antara lain yaitu niat, tujuan, rencana atau usulan, program, keputusan atau pilihan dan pengaruh. Niat (*Intentions*) adalah tujuan-tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan. Tujuan (*Goals*) adalah keadaan akhir yang hendak dicapai. Rencana atau Usulan (*Plans or Proposals*) adalah cara yang ditetapkan untuk dapat mencapai tujuan. Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Keputusan atau Pilihan (*Decisions or Choices*) adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. Sedangkan Pengaruh (*Effects*) adalah dampak dari program yang dapat diukur, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan dan bersifat primer atau sekunder.

Beberapa pendapat dari para ahli tersebut dapat diambil suatu kesimpulan terkait dengan definisi kebijakan publik yaitu bahwa:

Kebijakan publik didefinisikan sebagai apa saja yang diucapkan (*says*), apa saja yang dilakukan (*does*) dan apa saja yang tidak dilakukan (*does-not*) oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu persoalan publik. Rumusan definisi tersebut dianggap cukup menjelaskan arti dari kebijakan publik yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah publik pada umumnya pemerintah mengambil langkah-langkah dalam bentuk ucapan (*statement*), tindakan (*action*) dan ketetapan untuk tidak bertindak (*silent*). Masing-masing langkah tersebut membawa dampak yang sama luasnya (Albab, 2007:19).

2.2. Implementasi Kebijakan

Ada beberapa definisi terkait tentang implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2008:139) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Van Metter dan dan Van Horn seperti yang dikutip oleh Agustino (2008:139), implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik

oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.3. Implementasi Kebijakan model Merilee S. Grindle

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “*Implementation as a Political and Administrative Process*”. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu:

- 1) Prosesnya
Apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Pencapaian Tujuan Kebijakan
 - a) *Impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b) Tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran.

Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

- 1) *Content of Policy*, meliputi:

- a) *Interest Affected*

Yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, karena implementasi kebijakan melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi kebijakan.

- b) *Type of Benefits*

Yaitu dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan.

- c) *Extent of Change Envision*

Yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas.

- d) *Site of Decision Making*

Yaitu letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- e) *Program Implementer*

Yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten dan *capable*.

f) *Resources Committed*

Yaitu sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

2) *Context of Policy*, meliputi:

a) *Power, Interest and Strategy of Actor Involved*

Yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

b) *Institution an Regime Characteristic*

Yaitu karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan dimana implementasi kebijakan dijalankan.

c) *Compliance and Responsiveness*

Yaitu sejauhmana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

Pendekatan *Bottom-Up* menurut Grindle yaitu memandang bahwa implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat saja, namun berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan / permasalahan yang mereka alami.

Pada intinya, pendekatan *Bottom-Up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumber daya yang tersedia di daerahnya dengan sistem sosio-kultur yang ada agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif dan dapat menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan itu sendiri.

2.4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Solihin (2009:31) mengemukakan bahwa CSR adalah tanggung jawab suatu perusahaan atas dampak dari berbagai keputusan dan aktivitas mereka terhadap masyarakat dan lingkungan melalui suatu perilaku yang terbuka dan etis yang:

- a. Konsisten dengan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memperhatikan ekspektasi para pemangku kepentingan.
- c. Tunduk kepada hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional.
- d. Diintegrasikan ke dalam seluruh bagian organisasi.

Menurut Solihin (2009:145-146), dalam implementasi program CSR diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi program CSR dengan baik yaitu:

- a. Memperoleh Persetujuan dan Dukungan dari Para Pihak yang Terlibat
Dimaksudkan agar pelaksanaan CSR didukung oleh sumber daya perusahaan yang meliputi sumber daya finansial maupun sumber daya manusia perusahaan.
- b. Pola Hubungan (*Relationship*) dari Pihak yang Terlibat
Hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR, karena tanpa adanya pola hubungan yang jelas di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CSR maka kemungkinan besar pelaksanaan program CSR tersebut tidak akan dapat berjalan secara optimal dan kemungkinan untuk berlanjut (*sustainable*) akan berkurang.
- c. Adanya Pengelolaan Program yang Baik
Pengelolaan program yang baik akan terwujud bila terdapat kejelasan tujuan program, durasi waktu pelaksanaan program, kesepakatan mengenai strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program dan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara kontinuitas pelaksanaan kegiatan bila program CSR sudah berakhir.

Wibisono (2007) menguraikan ada 10 (sepuluh) keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), antara lain yaitu:

- a. Mempertahankan dan Mendongkrak Reputasi maupun *Image* Perusahaan
Kontribusi positif pasti akan mendongkrak *image* dan reputasi positif perusahaan. *Image/citra* yang positif ini penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan.
- b. Layak Mendapatkan *Sosial Licence to Operate*
Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan, ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan maka dengan sendirinya akan timbul rasa memiliki perusahaan, sehingga perusahaan dapat leluasa menjalankan roda bisnisnya di kawasan itu.
- c. Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan
Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan suatu hal yang esensial demi kesuksesan usaha. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk *recovery* akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program CSR. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR perlu dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan *stakeholders*.
- d. Melebarkan Akses Sumber Daya
Track records yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan untuk membantu melancarkan jalan menuju sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan.
- e. Membentangkan Akses Menuju *Market*
Investasi yang ditanamkan untuk program CSR dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar dalam memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.
- f. Mereduksi Biaya

Banyak penghematan biaya yang dapat dilakukan melalui program CSR. Misalnya yaitu dengan mendaur ulang limbah pabrik dalam proses produksi. Selain menghemat biaya produksi juga membantu agar limbah menjadi lebih aman bagi lingkungan.

g. **Memperbaiki Hubungan dengan *Stakeholder***

Implementasi CSR akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholder*, dimana komunikasi ini akan semakin menambah *trust* bagi *stakeholders* kepada perusahaan.

h. **Memperbaiki Hubungan dengan Regulator**

Perusahaan yang melaksanakan CSR umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

i. **Meningkatkan Semangat dan Produktivitas Karyawan**

Image / citra perusahaan yang baik di mata *stakeholders* dan kontribusi positif yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan.

j. **Peluang Mendapatkan Penghargaan**

Banyaknya penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada pelaku CSR akan menambah peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan *award*.

3. Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan keadaan subyek maupun obyek yang diamati berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang ada kemudian dilanjutkan dengan menganalisa fakta-fakta atau data-data tersebut secara kualitatif.

Lokasi penelitian yang digunakan Desa Wedani, Kecamatan Cerme – Kabupaten Gresik Jawa Timur terkait dengan industri tenun sarung yang merupakan jenis *home industry* warga setempat yang mendapatkan bantuan pinjaman dana dari PT. Telkom Indonesia, Tbk sebagai bentuk implementasi dari Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (PKBL).

Fokus dalam penelitian adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Sedangkan waktu penelitian kurang lebih selama 6 (enam) bulan, yaitu dimulai pada tanggal 1 Maret hingga 31 Agustus 2018.

Informan penelitian ini adalah Manager unit *Community Development Center* (CDC) pada PT. Telkom Indonesia, Tbk Divre V Jawa Timur – Kandatel Surabaya Barat dan mitra binaan yang memiliki *home industry* tenun sarung di digunakan Desa Wedani, Kecamatan Cerme – Kabupaten Gresik Jawa Timur

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik

Desa Wedani adalah desa yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian bercocok tanam, tambak dan *home industry* sarung tenun. Di Kabupaten Gresik, sentra penghasil sarung tenun tradisional ini banyak tersebar di Kecamatan Cerme dan Benjeng, seperti usaha mandiri keluarga yang banyak dijumpai di Desa Wedani Kecamatan Cerme.

Di Desa Wedani ini tak kurang dari 25 unit usaha keluarga (*home industry*) sarung tenun tradisional, baik yang berskala kecil (± 10 orang tenaga kerja) sampai dengan skala yang agak besar (± 100 orang tenaga kerja).

Sarung tenun tradisional khas Gresik Jawa Timur ini dikenal akan kaya motif dan corak. Dengan mempertahankan proses penenunan yang masih tradisional, sarung tenun tersebut memiliki tempat tersendiri di kalangan masyarakat.

Motif dan corak khas dari sarung tenun produksi Gresik adalah warnanya timbul dengan corak yang beragam, diantaranya yaitu corak kembang, garis-garis, gunung, hingga corak laut biru dengan 3 (tiga) jenis kain yakni dari kain sutera, fiber dan sisir.

Pembuatan sarung tenun ini tidak mengandalkan keahlian khusus. Bermula dari bahan dasar benang yang telah diberi pewarna sesuai dengan mode pasar, kemudian proses dilanjutkan dengan pemintalan.

Benang yang telah dipintal kemudian disekir menggunakan mihani untuk memperoleh benang dengan hasil yang lebih halus, lalu ditunen menggunakan peralatan tenun tradisional untuk dapat menentukan model dan corak kain dengan kombinasi warna yang berkualitas, sehingga pembuatan sarung tenun dengan peralatan tradisional ini menciptakan hasil yang maksimal.

Keistimewaan dari sarung tenun ini yaitu pada kualitas benangnya serta nilai seni yang tetap memperlihatkan ciri khas natural berupa motif kembang dan hiasan alam lainnya.

Harga sarung tenun ini bervariasi antara 70 ribu hingga 200 ribu rupiah untuk setiap potongnya tergantung dari motif dan jenis kainnya, dengan sasaran pasarnya yaitu

sejumlah kota besar di pulau Jawa dan sebagian untuk memenuhi permintaan dari Malaysia dan Brunei.

4.2. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Di dalam pelaksanaan Program Kemitraan, *Community Development Center* (CDC) dan Program Bina Lingkungan berpedoman pada:

- 1) PER-05/MBU/2007 pada tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 2) Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor KD.12/PS150/COP-B0030000/2006 pada tanggal 13 September 2006 tentang Pembentukan Organisasi Pusat Pengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (*Community Development Center*).

Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut “Program Kemitraan” adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi lebih tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut “Program BL” adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

4.3. Informasi dari CDC PT. Telkom Indonesia, Tbk Divre V Jawa Timur – Kandatel Surabaya Barat

Pada saat berlangsungnya kegiatan penelitian di unit CDC PT. Telkom Indonesia, Tbk Divre V Jawa Timur – Kandatel Surabaya Barat, peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan Manager unit CDC pada PT. Telkom Indonesia, Tbk Divre V Jawa Timur – Kandatel Surabaya Barat. Dalam wawancara tersebut ditemukan ada 2 (dua) program dalam unit CDC yaitu:

- a) Program Bina Lingkungan (Hibah)

Seperti pembangunan atau pemberian fasilitas umum pada Taman Surya, Taman Bungkul, dan lain-lain.

- b) Program Kemitraan (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)

Yaitu pemberian pinjaman lunak kepada masyarakat yang mempunyai usaha dengan persyaratan tertentu (Usaha Kecil – Menengah / UKM).

Dana yang digunakan oleh unit CDC dalam menerapkan PKBL yaitu sebesar 2% dari laba bersih perusahaan. Syarat pemberian pinjaman lunak yaitu: a) Masyarakat yang mempunyai usaha, b) Umur usaha minimal 2 (dua) tahun.

Hal tersebut ditambahkan juga dengan wawancara sebagaiberikut :

“Pemberian pinjaman lunak kepada Usaha Kecil – Menengah (UKM) maksimalnya yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan minimal / selebihnya tergantung dari survei yang dilakukan oleh perusahaan (survei kelayakan). Jangka waktu maksimal pelunasan pinjaman lunak yaitu dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.” (wawancara 3 Mei 2018 pukul 09.40 WIB)

Beliau mengemukakannya dalam wawancara yang juga berlangsung pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 09:40 WIB yaitu bahwa:

“Pemantauan dilakukan oleh PT. Telkom melalui Survey Opinion yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sekali (pada bulan November), dimana tim survei dari PT. Telkom yang berkaitan dengan program ini datang langsung ke mitra binaan untuk melakukan survei guna mengetahui kesuksesan implementasi program sesuai dengan respon / tanggapan dari mitra binaan melalui kuesioner terkait program kemitraan tersebut.”

Selain itu, dalam wawancara yang berlangsung pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 09:40 WIB tersebut beliau juga mengemukakan bahwa:

“Setiap 1 (satu) tahun sekali Pemerintah Kota Surabaya mengadakan pasar murah BUMN yang tempat/lokasinya diadakan di daerah-daerah miskin sesuai dengan data yang ada. Dimana dalam pasar murah BUMN tersebut, BUMN-BUMN yang turut berpartisipasi akan memasarkan produk-produk mitra binaannya dengan harga yang sangat terjangkau, sekaligus sebagai media untuk dapat mempromosikan produk usaha mitra binaannya.”

4.4. Informasi dari Mitra Binaan *Home Industry* Tenun Sarung di desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaen Gresik

Salah satunya yaitu *home industry* tenun sarung UD. Maharani milik Bapak Abdul Rokim sebagai mitra binaan PT. Telkom Indonesia, Tbk Divre V Jawa Timur – Kandatel Surabaya Barat. Hasil wawancara dengan beliau yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 6 Mei 2018 pukul 10:05 WIB tentang tahapan bantuan pinjaman dari PT. Telkom sebagai berikut:

“ Tahapan pemberian pinjaman dari Telkom yaitu: Minta formulir ke Telkom Mergoyoso di bagian CDC (PKBL) Telkom. Lalu formulir tersebut diisi dan dilengkapi kemudian langsung dikembalikan ke unit yang menangani program

tersebut dengan dilengkapi dokumen: Keterangan domisili usaha, Foto kopi KTP, KK (Kartu Keluarga), Surat Nikah, Jaminan pinjaman (bisa berupa surat tanah atau BPKB motor / mobil). Beberapa kemudian ada survei langsung yang dilakukan oleh pihak dari PT. Telkom sebanyak 3 (tiga) orang.”

Melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2018 pukul 10:05 WIB dengan Bapak Abdul Rokim, beliau juga menjelaskan:

“Usaha saya berdiri sejak tahun 2009 dan telah mendapatkan pinjaman melalui program kemitraan Telkom selama 7 (tujuh) tahun lamanya, mulai pada tahun 2009 (awal mendapatkan pinjaman). Jumlah nominal pinjaman yang pernah saya peroleh yaitu:

- a) Pinjaman awal sebesar Rp 15.000.000,-*
- b) Pinjaman kedua sebesar Rp 30.000.000,-*
- c) Pinjaman ketiga sebesar Rp 50.000.000,-*
- d) Pinjaman keempat sebesar Rp 80.000.000,- ”*

Jumlah pinjaman yang diajukan sebelumnya dari pihak pemohon sendiri yang menentukan jumlah nominalnya, namun tetap perusahaan yang menentukan batasan jumlah nominal yang diberikan / dipinjamkan. Misalnya saja pemohon mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- namun yang diterima oleh pemohon hanya sebesar Rp 15.000.000,-.

Apabila angsurannya baik (tepat waktu), bisa saja jumlah pinjaman yang diajukan dapat ditingkatkan nominalnya pada pengajuan pinjaman berikutnya. Misalnya saja di tahun pertama pinjaman awal yang diperoleh sebesar Rp 25.000.000,- lalu di tahun kedua meningkat menjadi Rp 30.000.000,- dan di tahun ketiga jumlah pinjaman yang diperoleh bisa mencapai hingga Rp 50.000.000,-.

Proses pencairan dana pinjaman ditransfer melalui Bank Mandiri sebagai mitra kerja Telkom dan cara pengembalian pinjamannya yaitu setiap tanggal 10 untuk tiap bulannya langsung secara otomatis terpotong dari saldo / rekening tabungan mitra binaan yang mengajukan pinjaman tersebut dengan bunga 6% pertahunnya. Batas pengembalian pinjaman yaitu dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

Bapak Abdul Rokim dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 6 Mei 2018 pukul 10:05 WIB mengutarakan bahwa:

“Total pegawai yang saya miliki sebanyak 86 orang dengan jumlah 16 orang pegawai laki-laki dan 70 orang pegawai perempuan. Jam kerjanya yaitu antara jam setengah delapan pagi sampai dengan jam empat sore tergantung dari para pegawai sendiri karena merupakan home industry sehingga bisa disesuaikan untuk jam kerjanya.”

Pengaruh dari adanya program kemitraan melalui bantuan pinjaman lunak tersebut yaitu:

- a) Usaha menjadi berkembang.
- b) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.
- c) Bisa menambah jumlah pegawai karena usahanya berkembang, sehingga pegawai dapat terus bekerja untuk menghidupi keluarganya.

Beliau juga menambahkan dalam wawancara yang berlangsung pada tanggal 6 Mei 2018 pukul 10:05 WIB bahwa:

“Sebelum mendapatkan program kemitraan, usaha saya masih ikut dengan orang (terikat dengan orang lain), produksinya juga masih berskala kecil karena dananya yang terbatas, namun saat ini produksi menjadi semakin berkembang karena mendapatkan bantuan pinjaman modal melalui program kemitraan Telkom. Cara menjual tenun sarungnya yaitu ada tengkulak yang mengambil hasil tenun sarung tersebut untuk dijual kembali dengan harga jual sarung perpotongnya kurang lebih yaitu Rp 190.000,-.”

Selain itu Bapak Abdul Rokim dalam wawancara yang berlangsung tanggal 6 Mei 2018 pukul 10:05 WIB juga menuturkan keuntungan atas hasil usaha *home industri*-nya tersebut seperti berikut:

“Penghasilan rata-rata saya dari usaha home industry tenun sarung ini kurang lebih Rp 500.000,- perharinya (penghasilan bersih / netto) dan sekitar Rp 30.000.000,- untuk perbulannya (penghasilan kotor / bruto), sehingga kira-kira dapat diperoleh Rp 15.000.000,- perbulannya untuk penghasilan bersih yang saya terima (netto).”

Program kemitraan dari Telkom ini sudah umum di kalangan warga setempat (Desa Wedani). Warga yang pertama kali mendapatkan bantuan pinjaman melalui program tersebut yaitu Pak Lurah selaku saudara (kakak) dari Bapak Abdul Rokim sendiri yang merasa bunga pinjamannya ringan dan usahanya menjadi berkembang.

Setelah Bapak Abdul Rokim mengetahui program tersebut, beliau tertarik untuk mengajukan pinjaman modal melalui program kemitraan Telkom yang pada akhirnya terjalin komunikasi dengan Pak Nurmawan terkait dengan program tersebut.

Tim petugas dari PT. Telkom, Tbk kemudian mensosialisasikan pada Bapak Abdul Rokim untuk mencari nasabah dari masyarakat setempat yang berkeinginan mengajukan pinjaman modal melalui program kemitraan tersebut, sehingga pada

akhirnya warga setempat mengetahui dari mulut ke mulut dan tertarik akan program kemitraan Telkom.

Selain program kemitraan, ada juga bantuan bina lingkungan (hibah) yang diberikan oleh Telkom di desa setempat yaitu berupa:

- a) Pihak Telkom mendirikan sebuah Koperasi di desa setempat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai bentuk hibah bangunan dari PT. Telkom.
- b) Pembangunan joglo atau gapura desa.
- c) Internet untuk desa sebagai fasilitas di balai desa.

Sosialisasi langsung dari pihak Telkom yang datang ke lokasi dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu dengan cara mengumpulkan warga di balai desa, namun sistem sosialisasi tersebut tidak dilakukan atau berlangsung secara *kontinue* (terus-menerus secara teratur / berkelanjutan).

Pihak PT. Telkom langsung dari Bandung pernah melakukan survei melalui telepon kepada warga setempat yang menjadi mitra binaan Telkom dengan program kemitraan. Selain itu juga pernah ada kunjungan langsung dari pihak Telkom ke desa setempat untuk dilakukan survei terhadap usaha mereka. Kurang lebih ada 4 (empat) orang yang melakukan survei ke lapangan (tempat usaha mitra binaan) yaitu:

- a) Orang pusat dari Telkom Bandung.
- b) Pihak CDC Telkom Ketintang
- c) Pihak CDC Telkom Mergoyoso
- d) Seorang petugas lapangan PT. Telkom wilayah Gresik

Anak dari Bapak Abdul Rokim yaitu Mas Saiful Anwar yang saat ini turut serta *menghandle* usaha *home industry* orang tuanya, sebelumnya pernah diberikan pelatihan internet dengan datang langsung ke Telkom Ketintang Surabaya.

Disana diberikan sosialisasi usaha melalui pembuatan website agar usaha yang dimiliki oleh mitra binaan dapat lebih dikenal oleh khalayak umum sebagai upaya untuk memasarkan / mempromosikan produk usahanya, sehingga lebih maju dan berkembang.

Selain itu juga sering diikuti di berbagai pameran hasil kerajinan *home industry* yang ada. Misalnya saja pameran yang pernah diadakan di JCC (Jakarta *Convention Center*) dan Yogyakarta, beliau diberikan uang saku oleh Telkom sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Kendala atau kritik yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Rokim dalam wawancara yang berlangsung pada tanggal 6 Mei 2018 pukul 10:05 WIB terkait dengan program kemitraan Telkom yaitu:

“Pada saat ini jumlah atau nominal pinjaman yang diberikan menjadi terbatas dan pemberian pinjaman juga dibatasi menjadi 3 (tiga) atau 4 (empat) kali saja untuk 1 (satu) orang mitra binaan, kalau dulu tidak pernah dibatasi seperti itu asalkan cara pembayaran/pelunasan pinjaman sebelumnya baik (tepat waktu).”

Hal tersebut mungkin disebabkan karena semakin banyaknya usaha warga yang mendapatkan program ini, sehingga bantuan pinjaman yang diberikan menjadi dibatasi agar dana yang tersedia dari perusahaan bisa mengcover permintaan warga untuk bisa mendapatkan program tersebut.

4.5. Analisis dengan Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain yaitu:

1) Proses

Proses peminjaman berjalan lancar dan pemanfaatan pinjaman juga dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal ini ditandai dengan prosedur dan persyaratan pinjaman yang dapat mereka penuhi sehingga pinjaman berjalan lancar. Adapun faktor proses bisa dipahami oleh mitra binaan yakni dalam langkah-langkah dibawah ini.

- a) Masyarakat datang ke PT. Telkom untuk mengambil dan mengisi form pengajuan pinjaman lunak.
- b) Pengembalian form yang telah diisi lengkap disertai dengan berkas / persyaratan yang diminta oleh PT. Telkom sesuai aturan yang telah ditentukan, seperti:
 - i. Keterangan domisili usaha.
 - ii. Foto kopi KTP, KK (Kartu Keluarga), Surat Nikah (bagi yang sudah berkeluarga).
 - iii. Jaminan pinjaman (bisa berupa surat tanah atau BPKB motor / mobil).
- c) Tim dari PT. Telkom melakukan survei kelayakan terhadap jenis usaha yang dikelola oleh calon mitra binaan untuk pengajuan pinjaman lunak.

- d) Mitra binaan yang mendapatkan pinjaman lunak harus memiliki rekening tabungan Bank Mandiri karena PT. Telkom bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk proses transaksi pinjaman lunak yang diberikan kepada mitra binaan.
- e) PT. Telkom mentransfer sejumlah uang sebagai bentuk pinjaman lunak kepada rekening mitra binaan yang lolos survei kelayakan untuk mendapatkan program kemitraan tersebut.
- f) Untuk proses pengembalian / pelunasan pinjaman dibatasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, dimana pihak Bank Mandiri secara otomatis akan melakukan pemotongan terhadap debit / saldo dari tiap rekening mitra binaan pertanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulannya. Namun dalam proses pengembalian angsuran kurang dapat berjalan lancar ini terbukti dari adanya tunggakan pembayaran bahkan ada yang pembayarannya macet

2) Pencapaian Tujuan Kebijakan

Pemanfaatan dana pinjaman berpengaruh pada pencapaian tujuan kegiatan mitra binaan. Pengaruh dari hasil bantuan pinjaman program kemitraan tersebut yaitu:

- a) Usaha menjadi berkembang.
- b) Dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitarnya.
- c) Bisa menambah jumlah pegawai karena usahanya berkembang, sehingga pegawai dapat terus bekerja untuk menghidupi keluarganya.

Sebelum mendapatkan program kemitraan, usaha masih ikut dengan orang (terikat dengan orang lain), produksinya juga masih berskala kecil karena dananya juga terbatas, namun saat ini produksi menjadi semakin berkembang karena telah mendapatkan pinjaman modal melalui program kemitraan Telkom.

Cara penjualan atau pemasaran produk yang sebelumnya masih melalui tengkulak dengan mengambil hasil tenun sarungnya untuk dijual kembali, sekarang cara untuk memasarkan hasil produksi *home industry* tenun sarung tersebut sudah bisa diakses melalui media internet agar lebih dikenal oleh khalayak umum sehingga diharapkan akan dapat memudahkan proses pemasaran dan penjualan produk.

Sosialisasi usaha melalui pembuatan website dimaksudkan agar usaha yang dimiliki oleh mitra binaan lebih maju dan berkembang, serta sering diikutkan di berbagai

pameran hasil kerajinan *home industry* yang ada untuk membantu mempromosikan produk mitra binaan. Namun demikian, pencapaian tujuan tersebut bervariasi diantara para mitra binaan.

3) Dukungan Publik

Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c) Milik Warga Negara Indonesia (WNI).
- d) Berdiri sendiri, maksudnya yaitu bukan merupakan anak perusahaan / cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e) Berbentuk badan usaha orang perseorangan yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dapat dikembangkan.
- g) Belum pernah dan tidak sedang mendapatkan bantuan pembinaan dari BUMN maupun institusi sejenis yang lain.

Sosialisasi program kemitraan ini sudah umum di kalangan warga Desa Wedani, dimana yang pertama kali mendapatkan program kemitraan (dana pinjaman lunak) tersebut yaitu Lurah dari desa setempat yang merasa bunga pinjamannya ringan serta usahanya menjadi lebih maju dan berkembang setelah mendapatkan program kemitraan dari Telkom tersebut.

Warga desa setempat mengetahui adanya program tersebut dari mulut ke mulut dan tertarik untuk dapat mengajukan pinjaman modal, sehingga pada akhirnya banyak diikuti oleh warga lain yang memiliki usaha *home industry*. Hal tersebut tentu mencerminkan antusiasme dari masyarakat dalam merespon implementasi kebijakan yang dibuat oleh PT. Telkom melalui program kemitraan tersebut.

4) Sumber Daya

Sosialisasi langsung dari pihak Telkom yang datang ke lokasi dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu dengan cara mengumpulkan warga di balai desa, namun sistem sosialisasi tersebut tidak dilakukan atau berlangsung secara *kontinue* (terus menerus secara teratur / berkelanjutan).

Pemberian pinjaman lunak kepada Usaha Kecil – Menengah (UKM) maksimalnya yaitu Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan minimal/selebihnya tergantung dari survei yang dilakukan oleh perusahaan (survei kelayakan). Jangka waktu maksimal pelunasan pinjaman lunak yaitu dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

5) Komunikasi

Program kemitraan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman lunak ini secara berkelanjutan akan terus dipantau oleh PT. Telkom sampai dengan pelunasan pinjaman selesai.

Pemantauan dilakukan oleh PT. Telkom melalui “*Survey Opinion*” yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sekali (pada bulan November), dimana tim survei dari PT. Telkom yang berkaitan dengan program ini datang langsung ke mitra binaan untuk melakukan survei guna mengetahui kesuksesan implementasi program sesuai dengan respon / tanggapan dari mitra binaan melalui kuesioner terkait dengan program kemitraan tersebut.

6) Program Implementer

PT. Telkom memberikan suatu pengarahan tentang cara untuk memasarkan produk melalui media internet agar lebih dikenal oleh publik sehingga diharapkan dapat memudahkan proses pemasaran dan penjualan produk.

Mitra binaan diberikan pelatihan sosialisasi usaha melalui pembuatan website untuk memasarkan / mempromosikan produk usahanya agar dapat lebih dikenal oleh publik sehingga lebih maju dan berkembang.

Selain itu juga sering diikuti di berbagai pameran hasil kerajinan *home industry* yang ada. Misalnya saja pameran yang pernah diadakan di JCC (Jakarta *Convention Center*) dan Yogyakarta. Ada juga bantuan bina lingkungan (hibah) yang diberikan oleh Telkom di desa setempat yaitu berupa:

- a) Pihak Telkom mendirikan sebuah Koperasi di desa setempat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu sebagai bentuk hibah bangunan dari PT. Telkom.
- b) Pembangunan joglo atau gapura desa.
- c) Internet untuk desa sebagai fasilitas di balai desa.

7) Compliance and Responsiveness (Kepatuhan dan Tanggapan / Respon)

Mitra binaan telah menjalankan kewajibannya meski belum memuaskan yakni

- a) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN pembina.
- b) Tertib dalam menyelenggarakan kegiatan pencatatan / pembukuan.
- c) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d) Menyampaikan laporan perkembangan usaha dalam setiap triwulan (tiga bulan sekali) kepada BUMN pembina.

5. Penutup

Implementasi PKBL oleh PT. Telkom pada industri sarung tenun di desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur di analisis dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle meliputi faktor proses, pencapaian tujuan kebijakan, dukungan publik, sumber daya, komunikasi, program implementer dan *compliance and responsiveness*. Proses peminjaman berjalan lancar karena para mitra binaan dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan namun dalam proses pengembalian angsuran kurang dapat berjalan lancar ini terbukti dari adanya tunggakan pembayaran bahkan ada yang pembayarannya macet. PKBL sudah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan meskipun belum bisa dikatakan semua mitra telah berhasil dengan kata lain keberhasilannya bervariasi. Dukungan publik dalam hal ini dari para pengrajin sarung tenun cukup besar karena banyak yang mengajukan pinjaman modal dengan pertimbangan bunga rendah, persyaratan yang fleksibel dan ada berbagai program untuk membantu mereka berhasil mencapai tujuan usahanya. Sumberdaya dari PT. Telkom sudah bekerja dengan cukup maksimal karena telah melakukan sosialisasi, pendampingan, pemantauan dan pembinaan sehingga dari pinjaman yang maksimal 100 juta cukup

berhasil terserap oleh para mitra binaan dengan jumlah pinjaman yang bervariasi. Komunikasi sudah dilakukan secara kontinyu dilakukan untuk memperoleh ukuran pencapaian hasil dan tingkat kepuasan mitra binaan. Program implementasi terus dilakukan cukup banyak tidak hanya bantuan pinjaman lunak tetapi juga diikuti dengan tehnik pemasaran secara online, pelatihan pembuatan website pemasaran produk sarung tenun, dan memfasilitasi keikutsertaan dalam pameran kerajinan produk home industry, manajemen koperasi sarung tenun di desa Wedani, dan pemasangan jaringan internet. Untuk faktor kepatuhan dan respon maka mitra binaan pada umumnya telah melaksanakan semua kewajiban meski belum bisa maksimal dan masih perlu ditingkatkan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Albab, Ulul. 2007. *Kebijakan Publik: Teori, Konsep dan Kajian Akademik*. Surabaya: ITS Press.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho.